

KERANGKA KELEMBAGAAN PELABUHAN PERIKANAN LINGKAR LUAR (*OUTER RING FISHING PORT*) DALAM KONTEKS PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH

Iin Solihin

KONDISI WILAYAH PERBATASAN DAN WILAYAH TERLUAR

Pada hakekatnya tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan antar kelompok masyarakat dan wilayah. Namun demikian sampai saat ini kesejahteraan masih belum dapat sepenuhnya dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Disamping itu, seiring dengan pembangunan ekonomi yang semakin berorientasi kepada mekanisme pasar serta adanya pergeseran struktur perekonomian, ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia merupakan hal yang sulit dihindari. Kesenjangan antar daerah terjadi terutama antara perdesaan dan perkotaan, antara Jawa dan luar Jawa, antara kawasan *hinterland* dengan kawasan perbatasan, serta antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia. Berbagai bentuk kesenjangan yang timbul meliputi kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi maupun sosial. Kesenjangan yang ada juga diperburuk oleh faktor tidak meratanya potensi sumberdaya terutama sumberdaya manusia dan sumber daya alam antara daerah yang satu dengan yang lain, serta kebijakan pemerintah yang selama ini terlalu sentralistis, baik dalam proses perencanaan maupun pengambilan keputusan.

Sejauh ini berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berbentuk kerangka regulasi maupun kerangka anggaran telah dilakukan. Namun demikian, hasilnya masih belum cukup memadai untuk mengurangi tingkat kesenjangan yang ada.

Salah satu ketimpangan pembangunan adalah antara wilayah-wilayah terluar dan merupakan perbatasan dengan negara-negara tetangga dengan wilayah-wilayah dalam. Kondisi wilayah-wilayah terluar masih sangat jauh dari memadai dibandingkan dengan wilayah lainnya. Permasalahan utama dari

ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan ini adalah arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi *'inward looking'*, sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

Hal ini tentu menjadi sangat krusial mengingat akan besarnya tekanan-tekanan dari negara lain terhadap wilayah terluar ini, baik berupa tekanan-tekanan politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pada wilayah-wilayah tertentu, bahkan masyarakat Indonesia lebih mengenal dan lebih tertarik untuk berinteraksi dengan masyarakat negara tetangga daripada dengan wilayah Indonesia sendiri. Apabila hal tersebut dibiarkan bukan tidak mungkin akan mengancam integritas Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa. Beberapa kasus sengketa perbatasan menunjukkan betapa kerugian dialami Indonesia karena kehilangan wilayah-wilayah perbatasannya seperti lepasnya Sipadan dan Ligitan.

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki sebagian besar wilayah terluar Indonesia adalah sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal ini dapat dipahami mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan, dimana aspek kelautan menjadi sangat dominan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terdapat 92 pulau terluar. Pulau-pulau tersebut mempunyai potensi kelautan dan perikanan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka sektor perikanan dan kelautan dapat menjadi basis dan andalan pengembangan ekonomi wilayah perbatasan tersebut.

Tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan pembangunan di wilayah terluar adalah begitu banyaknya wilayah yang harus ditangani, mengingat panjangnya garis pantai Indonesia yang berbatasan dengan negara lain. Beberapa wilayah tersebut bahkan lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau dari pusat-pusat pemerintahan Indonesia. Akibatnya masyarakat yang

berada di wilayah tertinggal pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan, sehingga akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Beberapa permasalahan yang kiranya sering dihadapi wilayah terluar adalah 1) Kurangnya aksesibilitas transportasi ke wilayah lain di Indonesia; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi seperti stasiun pemancar televisi dan radio, sehingga masyarakat di sekitar perbatasan sulit menerima siaran dari dalam negeri dan lebih mudah menerima siaran televisi dan radio asing atau negara tetangga. Hal ini akan mempengaruhi sikap bernegara sebagian warga di perbatasan; 3) Kepadatan penduduk yang relatif rendah dan tersebar, sehingga menyulitkan dalam proses penyuluhan dan pembinaan masyarakat; 4) Terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi antara penduduk perbatasan negara tetangga, seperti kasus Tawau (Malaysia) dengan Nunukan dan Sebatik di Kalimantan Timur; dan 5) Terbatasnya teknologi penangkapan yang berimplikasi pada relatif rendahnya produktivitas penangkapan. Kekayaan sumberdaya ikan yang ada justru banyak dicuri nelayan nelayan asing.

Pendekatan pembangunan wilayah terluar yang dimasa lalu lebih ditekankan semata pada aspek pertahanan dan keamanan negara, hendaknya diubah menjadi lebih menitikberatkan pendekatan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Oleh karena itu, program atau kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pembangkitan aktivitas perekonomian perlu didorong dan dikembangkan di wilayah terluar ini. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah perbatasan, maka diperlukan prioritas pembangunan. Fokus terhadap pembangunan prasarana fisik seperti jalan, pasar dan fasilitas umum lainnya, harus diikuti dengan pembangunan manusia yang mampu mengenal dan memanfaatkan potensi lokal untuk perbaikan mutu hidup mereka. Pada wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya perikanan yang besar, maka aktivitas perekonomian yang berbasis perikanan menjadi hal yang strategis untuk dilakukan.